

Rancangan Akhir **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023**



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BONE**

Jln. Laks. Yos. Sudarso No. 29
Tlp/Fax. (0481)21028

KATA PENGANTAR

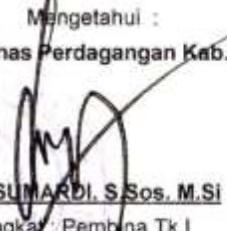
Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2018-2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaksud pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan setiap pada akhir tahun anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan Kabupaten Bone.

Watampone, 12 Maret 2019

Mengetahui :
Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bone


H. SUMARDI, S.Sos. M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 196808211991031010

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Dearah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASAAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	50

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi	52
5.2	Arah Kebijakan	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Program dan Kegiatan.....	55
6.2	Indikator Kinerja	57
6.3	Kelompok Sasaran	58
6.4	Pendanaan Indikatif	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
BAB VIII	PENUTUP	64
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan
Tabel 2.5	Kondisi awal tahun 2013 data tentang urusan Perdagangan
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013 -2018
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2017
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan/Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2017'
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 4.1	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sesuai dengan RPJMD



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pada dasarnya Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bone merupakan Implementasi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas di Dinas Perdagangan dalam kurung waktu 5 (Lima) tahun ke depan serta menjadi kerangka acuan bagi penyelenggara pembangunan di Bidang Perdagangan serta masyarakat pada umumnya serta menjadi kerangka acuan dalam menentukan arah pembangunan Perdagangan Kabupaten Bone melalui pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang tersedia.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

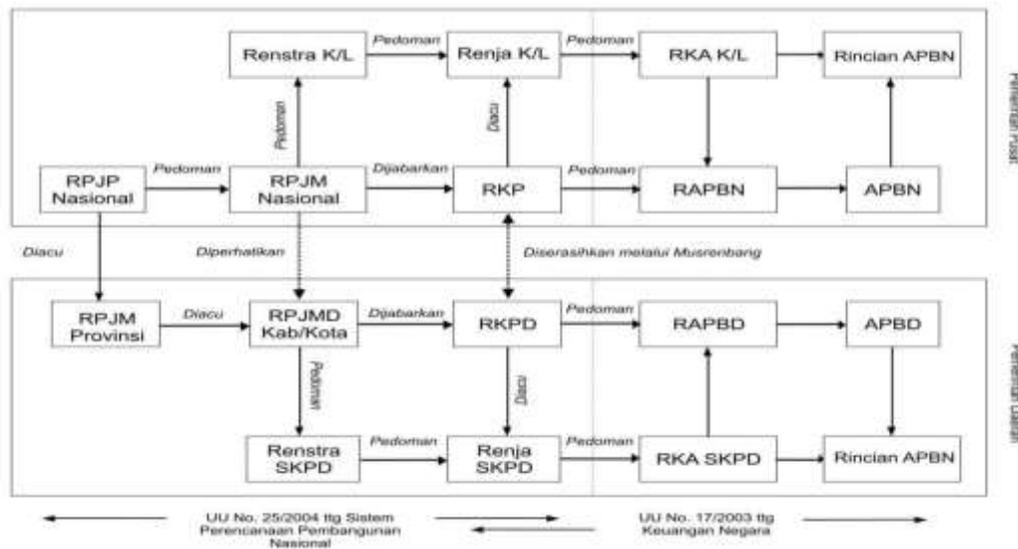
Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, kearah terpadu dan menyeluruh dan tanggap kepada perubahan setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Perangkat Daerah (RKPD).

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah

dan bersifat indikatif. Mengacu pada Pasal 16 Ayat (2) dalam Permendagri 86/2017, Renstra Dinas Perdagangan disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
 1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 2. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan rancangan awal;
 1. analisis gambaran pelayanan;
 2. analisis permasalahan;
 3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 4. analisis isu strategis;
 5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- c. penyusunan rancangan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- e. perumusan rancangan akhir; dan
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- f. penetapan.
Adapun skema keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan Renja Perangkat Daerah serta penganggaran adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Stretegis Dinas Perdagangan adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tenatang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Untuk panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Perdagangan selama 5 (lima) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perdagangan serta mempermudah melaksanakan

kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perdagangan adalah sbb :

Bab I Pendahuluan berisikan Latar Belakang , Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sitematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah berisikan Tugas,Fungsio Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berisikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran berisikan Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah, dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan berisikan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan berisikan Program dan Kegiatan Tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan berisikan tentang Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam Lima Tahun mendatang.

Bab VIII Penutup berisikan tentang kesimpulan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan kabupaten Bone serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

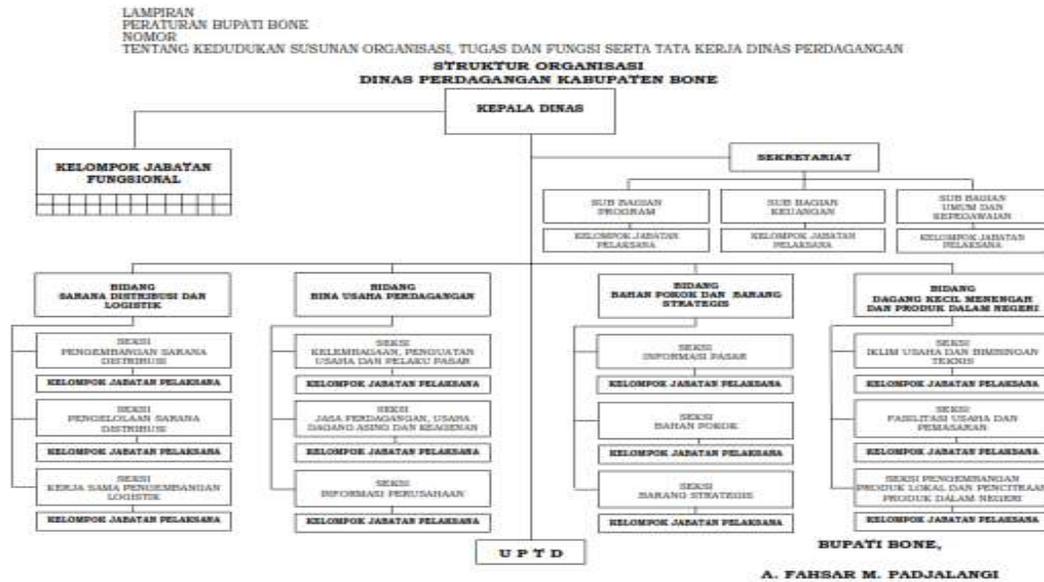
Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

FUNGSI

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. bidang pengembangan sarana distribusi dan logistik terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi;
 2. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
 3. Seksi Kerja Sama Pengembangan Logistik .
- d. bidang bina usaha perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan. Penguatan Usaha dan Pelaku Pasar;
 2. Seksi Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan; dan
 3. Seksi Informasi Perusahaan.
- e. bidang bahan pokok dan strategis terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Pasar;
 2. Seksi Bahan Pokok; dan
 3. Seksi Barang Strategis.
- f. bidang dagang kecil, menengah dan produk dalam negeri terdiri dari :
 1. Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis;
 2. Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Penciptaan Produk dalam Negeri.
- g. UPTD
- h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka kedudukan dan tugas pokok Dinas Perdagangan yaitu sebagai berikut

1. Sekretaris

Tugas :

membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

Fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Perdagangan;
- b. pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Perdagangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Perdagangan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Perdagangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Program

Tugas ;

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Perdagangan;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pendidikan;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Perdagangan;

- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- g. membuat rencana kerja tahunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas ;

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik

Tugas :

membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan distribusi dan logistik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
- d. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan logistik;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi;
- i. pelaksanaan penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan logistik;

- j. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengembangan pengelolaan sarana distribusi serta informas;
- k. pelaksanaan pendokumentasian hasil penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan logistik;
- l. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan sarana distribusi dan logistik: dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi mempunyai tugas

Tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sarana distribusi;
- b. melaksanakan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sarana distribusi ;
- c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sarana distribusi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik terkait bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi mempunyai

Tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi;

- c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana distribusi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik terkait bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi Seksi Kerja Sama Pengembangan Logistik

Tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kerja sama pengembangan sistem logistic;
- b. melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kerja sama pengembangan sistem logistic;
- c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama pengembangan sistem logistik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik terkait bidang tugasnya.

9. Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan

Tugas :

membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bina usaha perdagangan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;

- c. penyiapan penyusunan pelaksanaan pedoman, standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
- d. penyiapan kelembagaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
- e. pelaksanaan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- f. pelaksanaan penertiban tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- g. pelaksanaan penertiban surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
- h. pelaksanaan penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
- i. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawsan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- j. pelaksanaan penertiban pedagang kayu antar pulau terdaftar;
- k. pelaksanaan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis bina usaha perdagangan;
- m. pelaksanaan pendokumentasian hasil bina usaha perdagangan; dan
- n. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bina usaha perdagangan; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Pengembangan Produksi

Tugas :

- a. Menyusun kegiatan seksi pengembangan produksi sebagai acuan pelaksanaan tugas
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik
- c. Menganalisa data dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan produksi

- d. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha kecil menengah dalam melaksanakan kegiatan perdagangan
- e. Melaksanakan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pengembangan produksi sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan produksi sebagai pertanggung jawab
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

11. Seksi Kelembagaan, Penguatan Usaha dan Pelaku Pasar dipimpin oleh kepala seksi Seksi Kelembagaan, Penguatan Usaha dan Pelaku Pasar yang mempunyai

Tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kelembagaan dan penguatan usaha dan pelaku pasar;
- b. melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kelembagaan dan penguatan usaha pelaku pasar;
- c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kelembagaan dan penguatan usaha pelaku pasar; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan terkait bidang tugasnya.

12. Seksi Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan

mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan;
- c. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa perdagangan, di bidang penanaman modal dan usaha dagang asing dan di bidang keagenan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan terkait bidang tugasnya.

13. Seksi Informasi Perusahaan dipimpin oleh kepala Seksi Informasi

Perusahaan yang mempunyai

Tugas ;

- a. menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang informasi perusahaan;
- b. melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang informasi perusahaan;
- c. memonitoring dan meng evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang informasi perusahaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan terkait bidang tugasnya.

**14. Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis dipimpin oleh kepala
Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis mempunyai**

Tugas :

membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar bahan pokok dan barang strategis dalam negeri.

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan bahan pokok dan barang strategis;
- b. perumusan kebijakan di bidang peningkatan di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
- d. penyiapan penyusunan pelaksanaan pedoman, standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar; dan
- g. pelaksanaan kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- h. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- i. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- j. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

15. Seksi Sistem Informasi Pasar dipimpin oleh kepala Seksi Sistem Informasi Pasar mempunyai tugas :

Tugas ;

- a. menyiapkan bahan pedoman dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pasar
- b. melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi pasar
- c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi pasar
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

16. Seksi Bahan Pokok dipimpin oleh kepala Seksi Bahan Pokok mempunyai

Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan pasar, bahan pokok hasil industri dan bahan pokok agro.
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pasar, bahan pokok hasil industri dan bahan pokok agro.
- c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, bahan pokok hasil industri dan bahan pokok agro.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

17. Seksi Barang Strategis dipimpin oleh kepala seksi Barang Strategis mempunyai

Tugas ;

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan pasar barang strategis..
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pasar barang strategis

- c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan pasar barang strategis.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya

18. Bidang Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri dipimpin oleh kepala Bidang Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri mempunyai

Tugas :

membantu kepala dinas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha dagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
- c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran

usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
- g. pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi ekspor unggulan;
- h. pelaksanaan kampanye pencitraan produk skala provinsi (lintas kabupaten /kota);
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

19. Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis dipimpin oleh kepala Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis mempunyai

Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis bagi usaha dagang kecil dan menengah
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis bagi usaha dagang kecil dan menengah
- c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis bagi usaha dagang kecil dan menengah
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya

20. Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran dipimpin oleh kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran mempunyai

Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman di bidang akses pemasaran dan fasilitasi usaha bagi usaha dagang kecil dan menengah.
- b. melaksanakan kebijakan di bidang akses pemasaran dan fasilitasi usaha bagi usaha dagang kecil dan menengah.
- c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan di bidang akses pemasaran dan fasilitasi usaha bagi usaha dagang kecil dan menengah.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya

21. Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Pencitraan Produk dalam Negeri dipimpin oleh kepala Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Pencitraan Produk dalam Negeri mempunyai

Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman di bidang pencitraan produk dalam negeri serta sosialisasi program 100% Cinta Indonesia.
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pencitraan produk dalam negeri serta sosialisasi program 100% Cinta Indonesia.
- c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan di bidang pencitraan produk dalam negeri serta sosialisasi program 100% Cinta Indonesia.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Pegawai

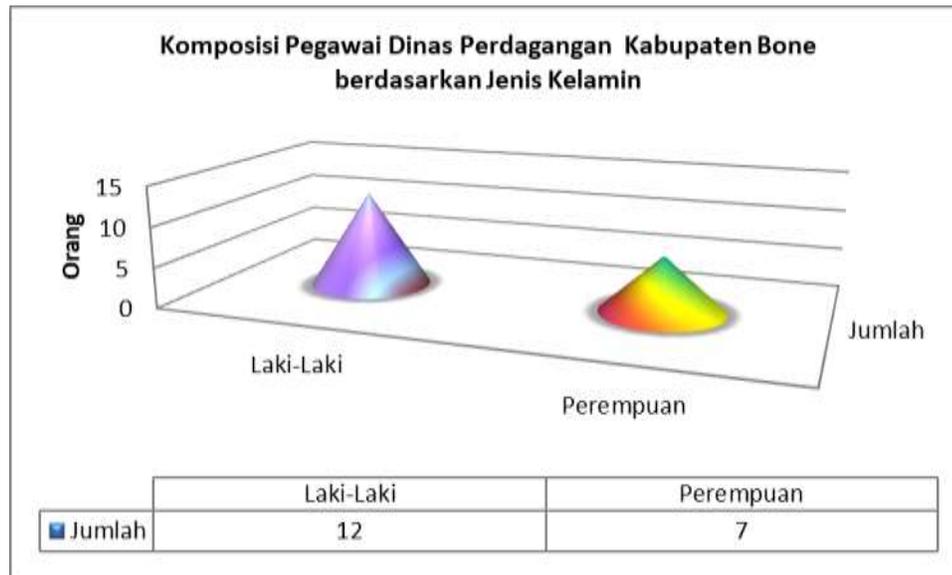
Jumlah pegawai yang berstatus PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Bone sampai dengan bulan Oktober 2018 adalah sebanyak

19 orang dan 24 Orang Staf Tenaga Kontrak/Honorar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1:
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-Laki	12	
2	Perempuan	7	
Jumlah		19	

Sumber : Disdag Laporan Triwulan III tahun 2018



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	7 orang	
2	Golongan III	11 orang	

3	Golongan II	1 orang	
4	Golongan I	0 orang	
5	Staf/Honorar	24 Orang	
Jumlah		43 orang	

Sumber :Daftar Hadir Dinas Perdagangan bulan Oktober 2018



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan

Komposisi tingkat pendidikan pegawai Dinas Perdagangan dapat di lihat pada table 2.3 .

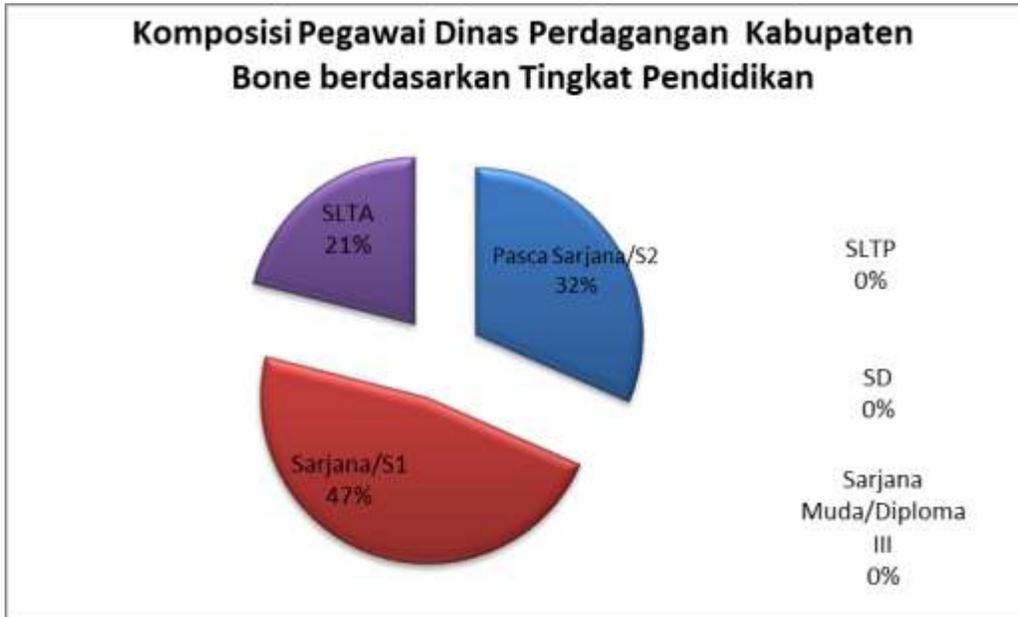
Tabel 2.3:

Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana/S2	6 orang	
2	Sarjana/S1	9 orang	
3	Sarjana Muda/Diploma III	0 orang	
4	SLTA	4 orang	
5	SLTP	0 orang	
6	SD	0 orang	
Jumlah		19	

	orang	
--	-------	--

Sumber : Disdag Laporan Triwulan III tahun 2018



Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perdagangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perdagangan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan professional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan Dinas Perdagangan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Asset

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perdagangan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantoryang dimiliki Dinas Perdagangan Kabupaten Bone dapat dilihat tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	2	3	
1	Notebook	4 Unit	Baik
2	Pc. Unit	9 Unit	Baik
3	Printer	6 Uni	Baik
4	Overhead Projector	1 Unit	Baik
5	Televisi	1 Unit	Baik
6	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
7	Lemari Penyimpanan	7 Unit	Baik
8	Mesik Ketik Manual Standar	2 Unit	Baik
9	Kusi Biasa	7 Unit	Baik
10	Kursi Kerja	8 Unit	Baik
11	Ac Unit	5 Unit	Baik
12	Sound System	1 Unit	Baik
13	Laptop	3 Unit	Baik

14	Meja Kerja	27 Unit	Baik
15	Lemari Arsip	4 Unit	Baik

Sumber : Dinas Disperindag Barang Tahun 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan yang melaksanakan dan menindaklanjuti Misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018, yaitu Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan dengan capain indicator sasaran adalah:

- 1) Kontribusi Bidang Perdagangan terhadap PDRB
- 2) Peningkatan Pasar daerah
- 3) Pembinaan Pasar Desa
- 4) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal
- 5) Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTTP

Kondisi awal tahun 2013 data tentang urusan Perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Kondisi awal tahun 2013 data tentang urusan Perdagangan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun	SKPD
		2013	
1.	Perdagangan		
1.	Peningkatan Pasar daerah	2	Dinas Perdagangan
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	2	Dinas Perdagangan
3.	Data Pengawasan UTTP (Kec.)	7834 UTTP	Dinas Perdagangan

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2013-2018 dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone
Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB				8,23	8,80	9,42	10,08	10,79	11,95	11,21	11,20	11,04	11,53	145%	127%	119%	110%	107%
Peningkatan Pasar daerah				2	2	2	2	2	1	1	3	3	4	50%	50%	150%	150%	200%
Pembinaan Pasar Desa				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)				3,6	5,2	6,8	8,4	10	3,16	3,28	4,17	4,32	5,45	88%	63%	61%	51%	55%
Data Pengawasan UTPP (Kec.)				19	21	23	25	27	15	15	15	17	20	79%	71%	65%	68%	74%

Dalam hal cakupan Kontribusi Bidang Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bone dapat dilihat juga pada diagram dibawah ini :



Gambar 2.5 Capaian Kontribusi Bidang Perdagangan terhadap PDRB

Dari diagram diatas diatas dapat dilihat bahwa dalam hal capaian Kontribusi bidang perdagangan terhadap PDRB melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam hal cakupan Peningkatan Pasar Daerah kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Bone dengan menggunakan dana DAK dan DAU Kondisi itu dapat dilihat Diagram berikut ini:



Gambar 2.6 Capaian Peningkatan Pasar daerah

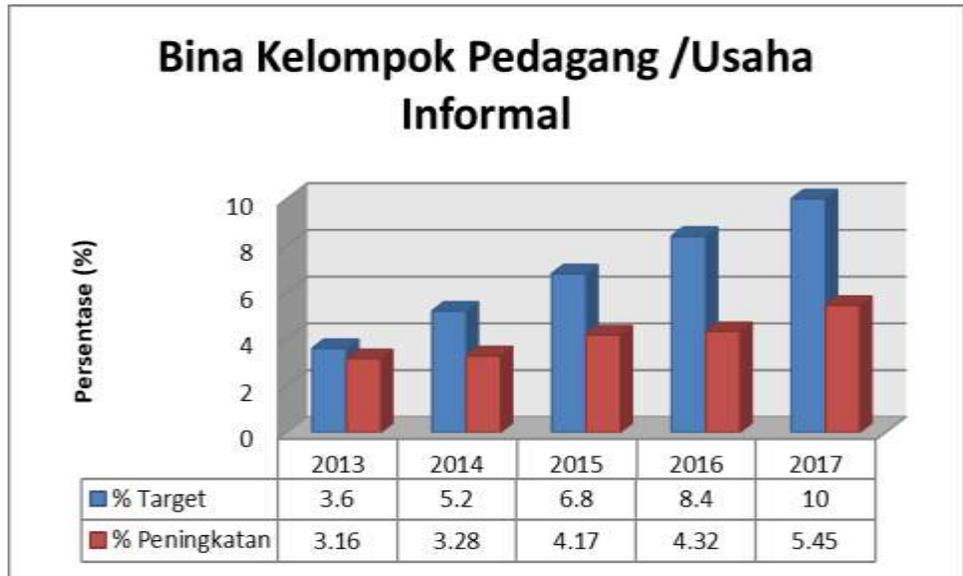
Dari diagram diatas dapat dilihat pada Tahun 2013 dan 2014 pencapaian realisasi hanya sebesar 50% hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus dari pusat hanya dapat membiayai pembangunan 1 Unit Pasar.

Dalam hal cakupan Pembinaan Pasar Daerah kegiatan yang dilakukan adalah Pembinaan yang dilakukan pada pengelola pasar Kondisi itu dapat dilihat Diagram berikut ini:



Gambar 2.7 Capaian Pembinaan Pasar Daerah

Dalam hal cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (%)
 Dapat dilihat dari Diagram berikut:

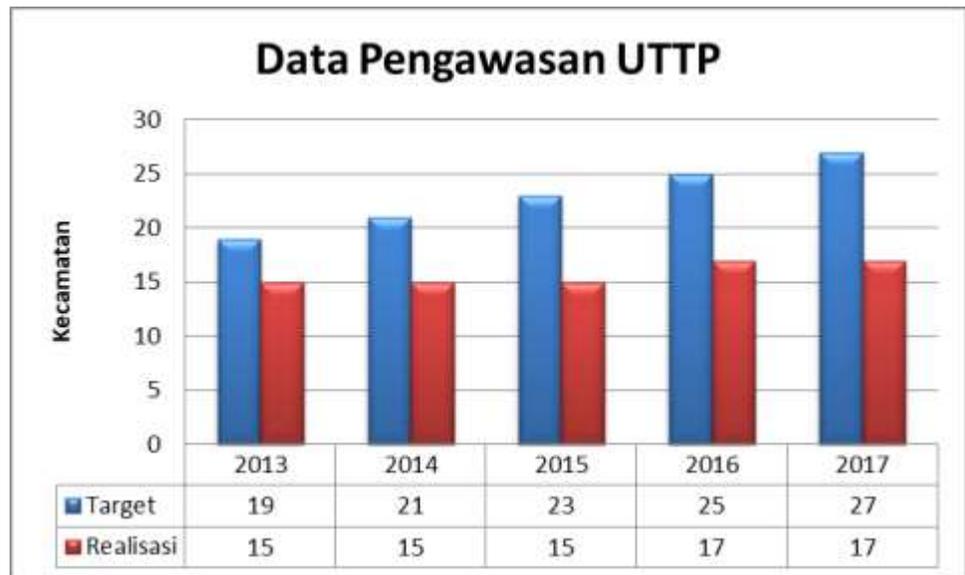


Gambar 2.8 Capaian Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 -2018 Target Bina Kelompok Pefagang/Usaha Informal tidak tercapai hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Jumlah Pedagang yang menjadi acuan dalam pencapaian program terlalu besar;
2. Anggaran yang digunakan untuk pembinaan Pedagang tidak mencukupi
3. Jumlah Personil (PNS) yang kurang untuk melakukan pembinaan.

Dalam hal cakupan Data Pengawasan UTTP (Kecamatan) kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Pengendalian dan Terwujudnya Tertib Ukur pada Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), utamanya terhadap Pemilik/ Pengguna dan Penjual BDKT, pelaksanaan pengawasan dalam upaya Peningkatan Pengawasan Kemetrollogian yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 2.9 Capaian Data Pengawasan UTTP

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 -2018 Target

Data Pengawasan UTTP tidak tercapai hal ini disebabkan karena tidak adaya tenga ahli metrology, dan sarana prasarana metrology belum memadai.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
I	Pendapatan	450,000,000	400,000,000	530,000,000	600,000,000	600,000,000	313,284,500	518,996,400	938,372,300	381,558,000	372,852,400	69.62%	129.75%	177.05%	63.59%	62.14%	7.46%	4.45%
	- DAK	-	-	4,462,292,000	6,283,879,000	3,816,842,900	-	-	4,432,779,800	6,336,108,000	3,816,842,900	0.00%	0.00%	99.34%	100.83%	100.00%	0.00%	0.00%
	- PAD	450,000,000	400,000,000	530,000,000	600,000,000	600,000,000	313,284,500	518,996,400	938,372,300	381,558,000	372,852,400	69.62%	129.75%	177.05%	63.59%	62.14%	7.46%	4.45%
	-Tugas Pembantuan	2,789,900,000	4,744,440,000	7,500,000,000	7,959,050,000	12,000,000,000	2,789,900,000	4,744,440,000	7,490,816,700	7,958,961,200	11,734,600,000	100.00%	100.00%	99.88%	100.00%	97.79%	44.01%	43.21%
II	Total Belanja	1,856,864,700	2,211,029,500	6,865,032,636	9,196,715,000	7,294,967,500	1,813,005,661	2,077,538,163	6,772,763,213	9,135,697,715	6,958,359,062	97.64%	93.96%	98.66%	99.34%	95.39%	40.79%	39.97%
	- Belanja Pegawai	1,164,250,700	1,400,292,500	1,389,905,300	1,572,041,000	1,728,347,500	1,148,864,477	1,381,274,031	1,391,858,269	1,441,617,914	1,614,450,547	98.68%	98.64%	100.14%	91.70%	93.41%	10.38%	8.88%
	- Belanja Barang dan Jasa	621,914,000	795,237,000	1,012,835,336	1,272,795,000	1,480,720,000	593,841,184	680,764,132	948,125,144	1,202,971,801	1,470,065,615	95.49%	85.61%	93.61%	94.51%	99.28%	24.22%	25.43%
	- Belanja Modal	70,700,000	15,500,000	4,462,292,000	6,351,879,000	4,085,900,000	70,300,000	15,500,000	4,432,779,800	6,491,108,000	3,873,842,900	99.43%	100.00%	99.34%	102.19%	94.81%	175.72%	172.46%

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan/Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	123,147,800	110,849,000	4,202,342,000	6,369,824,000	4,363,410,000	121,064,000	104,239,000	4,175,819,800	6,346,686,000	4,151,337,974	98.31%	94.04%	99.37%	99.64%	95.14%	143.98%	141.99%
-Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	27,347,800	74,249,000	26,900,000	27,020,000	19,060,000	27,249,000	74,079,000	24,890,000	26,443,000	19,060,000	99.64%	99.77%	92.53%	97.86%	100.00%	-8.63%	-8.55%
-Pengembangan Pasar Lelang Daerah	6,900,000	7,100,000	-	7,300,000	16,300,000	6,815,000	3,580,000	-	-	16,300,000	98.77%	50.42%	0.00%	0.00%	100.00%	23.98%	24.36%
-Pasar Murah	14,100,000	-	49,750,000	134,225,000	98,750,000	12,600,000	-	49,750,000	134,225,000	98,740,000	89.36%	0.00%	100.00%	100.00%	99.99%	62.68%	67.31%
-Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	74,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	0.00%
-Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat	-	-	4,125,692,000	6,201,279,000	4,134,100,000	74,400,000	-	4,101,179,800	6,186,018,000	3,922,042,900	0.00%	0.00%	99.41%	99.75%	94.87%	0.00%	169.45%
-Sistem Resi Gudang	-	29,500,000	-	-	61,000,000	-	26,580,000	-	-	61,000,000	0.00%	90.10%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
-Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	-	-	-	-	34,200,000	-	-	-	-	34,195,074	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.99%	0.00%	0.00%
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-	168,600,000	113,925,000	216,100,000	156,055,500	-	113,015,000	113,867,000	216,100,000	155,996,500	0.00%	67.03%	99.95%	100.00%	99.96%	0.00%	0.00%
-Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	-	-	-	-	9,460,000	-	-	-	-	9,460,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
-Pengembangan database informasi potensi unggulan	-	-	-	8,550,000	9,050,000	-	-	-	8,550,000	9,050,000	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
-Promosi Produk Daerah	-	168,600,000	113,925,000	207,550,000	137,545,500	-	113,015,000	113,867,000	207,550,000	137,486,500	0.00%	67.03%	99.95%	100.00%	99.96%	0.00%	0.00%
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	11,980,000	-	170,000,000	-	-	11,980,000	-	169,984,670	-	-	100.00%	0.00%	99.99%	0.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
-Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan	11,980,000	-	-	-	-	11,980,000	-	-	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
-Penilaian Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;	-	-	170,000,000	-	-	-	-	169,984,670	-	-	0.00%	0.00%	99.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Rencana Startegis Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	33,379,400	43,609,400	53,130,000	58,400,000	90,650,000	33,219,400	43,369,400	52,970,000	58,400,000	90,650,000	99.52%	99.45%	99.70%	100.00%	100.00%	28.37%	28.53%
-Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemptrologian Daerah	9,660,000	12,100,000	16,655,000	10,025,000	63,025,000	9,660,000	12,100,000	16,495,000	10,025,000	63,025,000	100.00%	100.00%	99.04%	100.00%	100.00%	59.82%	59.82%
-Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	10,834,700	11,234,700	15,675,000	18,400,000	-	10,834,700	11,209,700	15,675,000	18,400,000	-	100.00%	99.78%	100.00%	100.00%	#DIV/0!	-100.00%	-100.00%
-Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	12,884,700	20,274,700	20,800,000	19,975,000	27,625,000	12,724,700	20,059,700	20,800,000	19,975,000	27,625,000	98.76%	98.94%	100.00%	100.00%	100.00%	21.01%	21.38%
-Penanganan Pengaduan Konsumen	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48,960,000	59,080,000	61,580,000	65,500,000	-	48,110,000	48,200,000	46,602,700	65,500,000	-	98.26%	81.58%	75.68%	100.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	24,760,000	28,040,000	-	35,600,000	-	24,630,000	22,500,000	-	35,600,000	-	99.47%	80.24%	0.00%	100.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (M)	4,200,000	7,000,000	32,040,000	-	-	4,200,000	7,000,000	24,121,500	-	-	100.00%	100.00%	75.29%	0.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	20,000,000	24,040,000	29,540,000	29,900,000	-	19,280,000	18,700,000	22,481,200	29,900,000	-	96.40%	77.79%	76.10%	100.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	33,251,000	-	40,000,000	-	-	31,251,000	-	39,995,000	0.00%	0.00%	93.99%	0.00%	99.99%	0.00%	0.00%
Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	33,251,000	-	40,000,000	-	-	31,251,000	-	39,995,000	0.00%	0.00%	93.99%	0.00%	99.99%	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29,255,000	-	-	121,000,000	90,861,000	17,855,000	-	-	113,544,600	90,361,000	61.03%	0.00%	0.00%	93.84%	99.45%	32.75%	49.99%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29,255,000	-	-	121,000,000	90,861,000	17,855,000	-	-	113,544,600	90,361,000	61.03%	0.00%	0.00%	93.84%	99.45%	32.75%	49.99%

Rencana Startegis Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,100,000	106,126,400	418,500,000	165,700,000	168,904,000	88,053,000	88,697,984	390,661,600	162,672,000	168,549,250	92.59%	83.58%	93.35%	98.17%	99.79%	15.44%	17.62%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	331,600,000	-	-	-	-	331,600,000	-	-	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	7,000,000	-	-	18,000,000	-	7,000,000	-	-	18,000,000	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	1,500,000	5,000,000	55,000,000	31,000,000	-	1,500,000	-	55,000,000	31,000,000	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Pengadaan Mabeleur	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35,000,000	35,000,000	25,000,000	40,000,000	17,318,000	35,000,000	31,531,500	23,949,500	39,986,000	17,318,000	100.00%	90.09%	95.80%	99.97%	100.00%	-16.13%	-16.13%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	51,000,000	53,526,400	49,800,000	61,600,000	85,486,000	44,160,000	41,767,484	33,227,100	58,586,000	85,131,250	86.59%	78.03%	66.72%	95.11%	99.59%	13.78%	17.83%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9,100,000	9,100,000	7,100,000	9,100,000	9,100,000	8,893,000	6,899,000	1,885,000	9,100,000	9,100,000	97.73%	75.81%	26.55%	100.00%	100.00%	0.00%	0.58%
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	578,193,600	383,422,200	422,399,336	636,800,000	656,739,500	564,329,568	356,942,248	399,748,174	610,875,151	647,018,791	97.60%	93.09%	94.64%	95.93%	98.52%	3.24%	3.48%
Penyediaan Jasa Surat menyurat	289,456,800	-	-	-	-	282,524,784	-	-	-	-	97.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,500,000	25,900,000	30,535,336	30,800,000	21,183,000	15,704,484	22,512,148	19,372,475	15,319,651	17,953,262	84.89%	86.92%	63.44%	49.74%	84.75%	3.44%	3.40%
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	103,800,000	83,150,000	86,900,000	101,400,000	89,550,000	99,800,000	81,900,000	82,500,000	94,800,000	83,850,000	96.15%	98.50%	94.94%	93.49%	93.63%	-3.62%	-4.26%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,100,000	1,200,000	1,200,000	5,000,000	5,000,000	1,100,000	307,000	770,000	1,500,000	5,000,000	100.00%	25.58%	64.17%	30.00%	100.00%	46.01%	46.01%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	17,500,000	-	-	-	-	16,433,000	-	-	-	0.00%	93.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	13,572,200	-	-	-	-	11,552,500	-	-	-	0.00%	85.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,125,000	1,200,000	1,500,000	3,136,000	2,400,000	1,125,000	987,700	1,425,000	3,136,000	2,400,000	100.00%	82.31%	95.00%	100.00%	100.00%	20.86%	20.86%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Paeraturan Perundang-undangan	5,200,000	10,000,000	10,000,000	17,200,000	25,000,000	5,190,000	6,960,000	9,885,000	17,200,000	24,775,000	99.81%	69.60%	98.85%	100.00%	99.10%	48.08%	47.81%
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	32,900,000	-	-	-	-	29,030,000	-	-	-	0.00%	88.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	112,672,000	198,000,000	220,000,000	375,000,000	375,961,500	112,582,600	187,259,900	219,389,699	374,689,600	375,464,729	99.92%	94.58%	99.72%	99.92%	99.87%	35.15%	35.14%
Penyediaan Ongkos Kantor	46,339,800	-	-	-	-	46,302,700	-	-	-	-	99.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	-	-	72,264,000	104,264,000	137,645,000	-	-	66,406,000	104,229,900	137,575,800	0.00%	0.00%	91.89%	99.97%	99.95%	0.00%	0.00%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bone antara lain sebagai berikut:

a) Kekuatan (STRENGTHS)

1. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi perdagangan
2. Potensi pelaku usaha perdagangan dari segi kuantitatif cukup besar.
3. Adanya peraturan/ketentuan bagi perdagangan

b) Kelemahan (WEAKNESSES)

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
2. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar
3. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku
4. Terbatasnya daya saing produk UMKM
5. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;
6. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.

c) Peluang (OPPORTUNITIES)

1. Berkembangnya industri kreatif
2. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;
3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan;
4. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
5. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD

d) Ancaman (THREATS)

1. Lemahnya penegakan hukum (low enforcement);
2. Maraknya rentenir;
3. Globalisasi dan perdagangan bebas;
4. Tingginya jumlah toko modern
5. Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok;
6. Terbatasnya infrastruktur ekonomi;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Paradigma Pembangunan pada sektor Perdagangan saat ini tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan berbagai aspek sehingga diperlukan perencanaan yang terintegrasi dan berfokus pada bidang pembangunan Perdagangan yang strategis sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kemajuan Kabupaten Bone sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan pedagang dan masyarakat pada umumnya sehingga diperlukan kemampuan dalam menganalisa berbagai aspek kondisi dan berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan sektor Perdagangan, sehingga permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan alternatif pilihan pemecahannya dapat dilakukan dengan pola responsive dan partisipatif oleh semua stakeholder sehingga resistensi permasalahan yang ada dapat dilakukan dengan pola pendekatan pada tingkat keseriusan, tingkat kegawatannya, tingkat kedalamannya dan spesifikasinya serta pertumbuhan dari suatu permasalahan.

Adapun rumusan masalah yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bone dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 sebagaimana yang akan diuraikan nanti pada lampiran selanjutnya dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Tabel
3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sarana dan Prasarana	Kurang memadainya sarana dan prasarana perdagangan;	Masih Banyak Sarana dan Parasarana Perdagangan (Pasar) yang belum memunjang aktifitas perdagangan
2	Perlindungan Konsumen	Masih banyaknya barang yang tidak aman yang beredar di masyarakat;	Kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang dan Jasa
		Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Kurangnya Sosialisasi dan pembinaan secara langsung terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha mengenai Hak dan kewajibannya
		Masih banyaknya timbangan/alat timbang yang belum memiliki sertifikat tera.;	Kurangnya pengawasan serta Sosialisasi dan pembinaan secara langsung terhadap pelaku usaha untuk melakukan peneraan terhadap timbangan yang dimiliki
3	Pengembangan UMKM	Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha;	Kurangnya pembinaan terhadap UKM mengenai pengelolaan modal dan pinjaman modal pada perusahaan peminjaman Modal
		Masih kurangnya pengetahuan UKM dalam mengembangkan usahanya;	Kurangnya pembinaan UKM secara langsung mengenai Pengembangan usaha

		Masih Kurangnya Pengetahuan UKM untuk melakukan kegiatan ekspor	Belum adanya perusahaan ekspor yang beroperasi di kabupaten Bone sehingga pelaksanaan ekspor barang dilakukan melalui perusahaan yang ada di Makassarsehingga pengetahuan untuk melakukan ekspor barang masih kurang
4	Promosi Produk	Kurangnya Promosi Produk Unggulan Daerah	Masih kurangnya produk unggulan kabupaten bone yang memiliki kemasan yang menarik dan kualitas terjaga

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bone nomor 86 Tahun 2016, dimana bertugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Apabila dilihat dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program Bupati terpilih dikaitkan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone maka hubungan dan korelasi yang sangat relevan dan erat kaitannya adalah sebagai berikut :

Visi

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri

menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**,dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**,mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari Misi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang berkorelasi langsung dengan Dinas perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. **Misi 1 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.**
- b. **Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.**

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan

Sasaran : 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan

Berdasarkan kondisi objektif dan pelaksanaan pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan untuk mewujudkan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah yang telah disebutkan diatas tentunya akan diperhadapkan dengan permasalahan pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian, maka permasalahan tersebut perlu dikolaborasi yang mana Faktor Penghambat dengan mana Faktor Pendorong, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat adalah :

1. Jumlah dan kualifikasi SDM aparat
2. Kondisi geografis dan luas wilayah Kab. Bone
3. Sarana distribusi masih terbatas
4. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha
5. Kondisi masyarakat yang masih dilatarbelakangi budaya agraris
6. Pengelolaan perdagangan belum dikelola secara profesional
7. Terbatasnya pembiayaan dalam mendukung aktivitas
8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha
9. Kurangnya kemampuan untuk mengakses pasar
10. Kurangnya modal usaha
11. Kecenderungan penggunaan/mengonsumsi produk luar

b. Faktor Pendorong adalah

1. Adanya kebijakan Pemerintah Kab. Bone mengembangkan Agrobisnis
2. Adanya potensi sumber daya yang memadai

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, dengan indikator:
 - a) Pertumbuhan ekspor non migas
 - b) Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor
 - c) Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan, dengan indikator:
 - a) % penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor
 - b) % pengamanan kebijakan nasional di forum internasional
 - c) % pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
 - b) Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding)
 - b) Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor

5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), dengan indikator:
 - a) Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, dengan indikator:
 - a) Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi PBK
 - b) Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
 - c) Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator:
 - a) Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah
 - b) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - c) Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan
10. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan indikator:
 - a) Indeks Keberdayaan Konsumen
 - b) % barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku
 - c) % barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan
 - d) % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, dengan indikator:
 - a) Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

- b) % Kabupaten/Kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP maksimal 3 (tiga) hari

12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, dengan indikator:

- a) Meningkatnya dukungan kerja layanan publik
- b) Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan
- c) Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
- d) Meningkatnya efektivitas pengawasan internal

13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan, dengan indikator:

- a) Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan

14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian, dengan indikator:

- a) % hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan
- b) % rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I

Mengacu pada Renstra Kementerian Perdagangan RI dan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dikemukakan faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pada Dinas Perdagangan Kab. Bone

Adapun Faktor Penghambat adalah :

1. Kurang dan terbatasnya Alokasi Pembiayaan
2. Kurangnya Komitmen dan Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menjalankan kewenangan
3. Kurangnya Singkronisasi Program dan Kegiatan
4. Alokasi kegiatan pusat

Adapun Faktor Pendukung adalah :

1. Adanya Kebijakan Pusat untuk mendorong pertumbuhan Perdagangan di luar Pulau Jawa
2. Adanya kebijakan Provinsi untuk mengembangkan Komoditi Unggulan Daerah dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)
3. Adanya kebijakan Provinsi untuk menumbuhkan Wira Usaha baru yang berbasis sumber Daya Lokal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan berlakunya Undang-Undang yang mengatur tentang Tata Ruang dan Kajian Lingkungan hidup Strategis yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah, maka hal ini akan membawa konsekuensi logis terhadap Kegiatan Perdagangan sehingga hal ini akan mempengaruhi permasalahan pelayanan di Dinas Perdagangan.

Faktor Penghambat :

1. Regulasi ini belum dipahami masyarakat
2. Belum adanya penjabaran sehingga sulit untuk dipedomani
3. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi
4. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan

Faktor Pendukung :

1. Adanya kepastian untuk berusaha
2. Kondisi usaha akan lebih baik
3. Adanya keteraturan dalam berusaha

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan isu strategis dari permasalahan - permasalahan program yang ditemukan dalam penyelenggaraan kegiatan – kegiatan pembangunan di lapangan. Untuk menentukan isu stategis secara benar dan akurat maka beberapa fakta - fakta kegiatan penting dalam pembangunan sektor Perdagangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Anggaran yang terbatas
- c. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan Perdagangan yang dibina
- d. Rendahnya kontribusi Perdagangan dalam PDRB
- e. Rendahnya akses dan jaringan pasar
- f. Masih kurang networkning dalam pembinaan

- g. Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha
- h. Masih kurangnya cakupan dan volume pembinaan pada UDKM
- i. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi wirasusahawan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone Periode 2018-2023 yang dijumpai melalui Tupoksi Dinas Perdagangan melalui Misi 1 Meningkatkan Tatakelola Pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Misi 2 yaitu Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf hidup Masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan
- b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan
- c. Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Tabel 4.1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR IMPACT	BASELINE	TARGET						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11.53	11.54	11.77	12.01	12.25	12.49	12.74	
			Persentase Pasar dalam Kondisi baik	35%	40%	50%	56%	63%	69%	75%	
			Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
			Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	5.45	5.56	5.67	5.78	5.90	6.02	6.14	
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Belum Ada	CC	CC	B	B	BB	BB	



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Strategi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
5. Meningkatkan Efektivitas pengawasan barang/jasa dan tertib ukur

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran dengan misi yang ingin diwujudkan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, maka ditetapkanlah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja

- b. Peningkatan dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan diwilayah potensial
- c. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk Unggulan Daerah
- d. Peningkatan Pembinaan terhadap Usaha Dagang Kecil dan Menengah
- e. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi 1 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	1. Peningkatan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	1. Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja
Misi 2 : Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf hidup Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1. Peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat	1. Peningkatan dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan diwilayah potensial
	2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen	2. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	2. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk Unggulan Daerah
		3. Peningkatan Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah	3. Peningkatan Pembinaan terhadap Usaha Dagang Kecil dan Menengah

		4. Meningkatkan Efektivitas pengawasan barang/jasa dan tertib ukur	4. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
--	--	--	---



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Sebagai penjabaran dari kebijakan dan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bone menetapkan program pokok selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6 Program Penunjang Pemerintahan Umum
- 7 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- 9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- 10 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; dan
- 11 Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah

Implementasi dari Rencana Program pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, maka ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan;
 - f. Rapat – rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - g. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - c. Pengadaan Peralatan gedung Kantor;
 - d. Pengadaan Mabeleur;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur.
 - i. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatannya yaitu :
- a. Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang – Undangan.;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan formal.
- 4 Peningkatan disiplin aparatur; kegiatannya yaitu :
- a. Pengadaan Pakaian Korpri;
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 - c. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya;
- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dengan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6 Program Penunjang Pemerintahan Umum meliputi kegiatan :
- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- 7 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan meliputi kegiatan :
- a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
 - b. Operasionalisasi dan Pengembanga UPT Kemetrolagian Daerah;.
 - c. Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok;
 - d. Pengawasan Alat UTTP dan BDKT;
 - e. Penanganan Pengaduan Konsumen
- 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport meliputi :
- a. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Eksport dan Import;

- b. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan;.
 - c. Promosi Produk Daerah;
- 9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri meliputi kegiatan
- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha;
 - c. Pengembangan Pasar Lelang Daerah;
 - d. Fasilitasi Pasar Murah;
 - e. Sistem resi Gudang;
 - f. Bimbingan Teknis Pengolah Pasar dan Perdagangan.
- 10 Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah meliputi kegiatan :
- a. Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM
 - b. Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM
- 11 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; dan
- a. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - b. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - c. Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - d. Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

6.2 Indikator Kinerja

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program periode 2018 -2023 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	<i>Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan</i>	x100%	BPS	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
			<i>Jumlah total PDRB</i>			
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	<i>Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik</i>	x100%	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
			<i>Jumlah Seluruh Pasar</i>			
		Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	<i>Jumlah Potensi Komoditi Unggulan yang terpublikasi</i>	x100%	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN
			<i>Jumlah Keseluruhan Komoditi Unggulan</i>			
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	<i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang dibina</i>	x100%	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI		
	<i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal</i>					
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	<i>Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang</i>	x100%	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS
			<i>Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang</i>			
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	<i>Jumlah Laporan Konsumen yang di Tindak Lanjuti</i>	x100%		
			<i>Jumlah Laporan Konsumen</i>			

6.3 Kelompok Sasaran

Sasaran program/kegiatan pengembangan sector perdagangan adalah masyarakat pedagang pasar rakyat/tradisional, pelaku UMKM, Pedagang Kaki Lima, masyarakat umum, dan stakeholders yang terkait dengan sektor perdagangan.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Sulawesi Selatan, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan dalam renstra ini hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara lengkap ditampilkan pada Lampiran.

Tabel 6.2
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar (%)	12	10	6.256.818.500	11	5.666.649.260	12	6.854.714.800	14	7.528.398.230	16	8.269.012.101	16	9.083.227.560	16	9.083.227.560	Disdag	
-Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Terlaksananya Sosialisasi /Penyuluhan dan Peninjauan Lokasi Pengembangan Usaha	100	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	29.282.000	100%	29.282.000	Disdag	
-Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah Peserta Pasar Lelang	8	8	15.550.000	8	16.000.000	5	17.600.000	5	19.360.000	5	21.296.000	6	23.425.600	6	23.425.600	Disdag	
-Pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	3	3	116.820.000	3	166.820.000	3	175.161.000	3	183.919.050	3	193.115.003	3	202.770.753	3	202.770.753	Disdag	
-Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	Tersedianya Sarana Penunjang Pasar yang Representatif	0	0	-	1	56.772.480	5	283.862.400	5	312.248.640	5	343.473.504	5	377.820.854	5	377.820.854	Disdag	
-Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat	Tersedianya Pasar yang Lebih Representatif	4	5	6.007.550.000	3	5.250.000.000	3	5.775.000.000	5	6.352.500.000	5	6.987.750.000	5	7.686.525.000	5	7.686.525.000	Disdag	
-Sistem Resi Gudang	Terbangunnya Operasionalisasi	2	2	66.598.500	2	66.598.500	2	250.000.000	2	275.000.000	2	302.500.000	2	332.750.000	2	332.750.000	Disdag	
-Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Pasar dan	1	1	30.300.000	1	30.300.000	1	30.300.000	1	30.300.000	1	30.300.000	1	30.300.000	1	30.300.000	Disdag	
-Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar	Jumlah Rehab Pasar Desa	0	0	-		60.158.280	5	300.791.400	5	330.870.540	5	363.957.594	5	400.353.353	5	400.353.353	Disdag	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Ketersediaan Data Potensi Unggulan (%)	75	75	158.605.000	80	155.376.000	85	170.913.600	90	188.004.960	95	206.805.456	95	227.486.002	95	227.486.002	Disdag	
-Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Jumlah Peserta Sosialisasi	20	20	10.791.000	20	13.366.000	20	14.702.600	20	16.172.860	20	17.790.146	20	19.569.161	20	19.569.161	Disdag	
-Pengembangan database informasi potensi unggulan	Data Potensi Unggulan Kabupaten Bone per Kecamatan	1	1	16.514.000	1	13.010.000	1	14.311.000	1	15.742.100	1	17.316.310	1	19.047.941	1	19.047.941	Disdag	
-Promosi Produk Daerah	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Daerah	4	4	131.300.000	4	129.000.000	4	141.900.000	4	156.090.000	4	171.699.000	4	188.868.900	4	188.868.900	Disdag	
Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah	Cakupan Bina Usaha /UKM (%)	20	20	-	25	22.000.000	30	24.200.000	40	26.620.000	50	29.282.000	50	32.210.200	50	32.210.200	Disdag	
-Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	0	0	-	20	11.000.000	20	12.100.000	20	13.310.000	20	14.641.000	20	16.105.100	20	16.105.100	Disdag	
-Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM	Jumlah Peserta Pelatihan Clean Produk dan Kemasan	0	0	-	20	11.000.000	20	12.100.000	20	13.310.000	20	14.641.000	20	16.105.100	20	16.105.100	Disdag	

Rencana Startegis Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	20	20	11.042.000	25	10.347.000	30	876.381.700	40	964.019.870	50	1.060.421.857	50	1.166.464.043	50	1.166.464.043	Disdag	
-Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan;	Jumlah Peserta Penyuluhan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;	20	20	11.042.000	20	10.347.000	20	11.381.700	20	12.519.870	20	13.771.857	20	15.149.043	20	15.149.043	-	
-Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;	Jumlah Paket Bantuan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;	0	0	-	0	-	2	350.000.000	2	385.000.000	2	423.500.000	2	465.850.000	2	465.850.000	-	
-Bantuan Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;	Jumlah Penerima Bantuan Modal Pedagang Kaki Lima	0	0	-	0	-	20	500.000.000	25	550.000.000	25	605.000.000	25	665.500.000	25	665.500.000	-	
-Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;	Jumlah Paket Pengawasan Mutu Dagang	0	0	-	0	-	5	15.000.000	5	16.500.000	5	18.150.000	5	19.965.000	5	19.965.000	-	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (%)	80	80	88.476.000	85	121.576.000	90	216.025.000	95	237.627.500	100	261.390.250	100	287.529.275	100	287.529.275	-	
-Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kentrologian Daerah	Jumlah Kecamatan pelaksanaan Pengawasan Terlib Urur	17	10	50.750.000	15	82.750.000	18	91.025.000	20	100.127.500	25	110.140.250	27	121.154.275	27	121.154.275	-	
-Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	12	12	13.400.000	12	10.000.000	24	25.000.000	24	27.500.000	24	30.250.000	24	33.275.000	24	33.275.000	-	
-Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	Jumlah Data Harga Kebutuhan Pokok	48	48	24.326.000	48	21.826.000	48	40.000.000	48	44.000.000	48	48.400.000	48	53.240.000	48	53.240.000	-	
-Pengawasan Alat UTPP dan BDKT;	Jumlah Alat UTPP yang ditera	0	0	-	0	-	100	40.000.000	120	44.000.000	140	48.400.000	160	53.240.000	160	53.240.000	-	
-Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Laporan Penyelesaian permasalahan Pengaduan Konsumen	0	0	-	1	7.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	26.620.000	-	
Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum tiap tahun anggaran (%)	0	0	-	100	42.000.000	100	46.200.000	100	50.820.000	100	55.902.000	100	61.492.200	100	61.492.200	-	
Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran	0	0	-	1	42.000.000	1	46.200.000	1	50.820.000	1	55.902.000	1	61.492.200	1	61.492.200	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	36.200.000	100	66.100.000	100	72.710.000	100	79.981.000	100	87.979.100	100	96.777.010	100	96.777.010	-	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	3	36.200.000	3	36.200.000	3	39.820.000	3	43.802.000	3	48.182.200	3	53.000.420	3	53.000.420	-	
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	-	10	29.900.000	10	32.890.000	10	36.179.000	10	39.796.900	10	43.776.590	10	43.776.590	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	85	85	95.000.000	85	95.000.000	90	158.500.000	90	174.350.000	95	191.785.000	95	210.963.500	95	210.963.500	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	8	8	95.000.000	8	95.000.000	8	104.500.000	8	114.950.000	8	126.445.000	8	139.089.500	8	139.089.500	-	
Pendidikan dan Pelatihan formal.	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	0	0	-	0	-	5	54.000.000	5	59.400.000	5	65.340.000	5	71.874.000	5	71.874.000	-	

Rencana Startegis Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	95	100	256.380.000	100	828.824.000	100	527.990.800	100	600.789.880	100	345.868.868	100	653.455.755	100	653.455.755	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran	0	6	104.982.000	1	450.000.000	0	-	1	350.000.000,00	2	70.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000	-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit/Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran	3	5	31.750.000	0	-	5	34.925.000	5	38.417.500	5	42.259.250	5	46.485.175	5	46.485.175	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit/Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran	6	2	12.300.000	3	271.496.000	3	13.530.000	3	14.883.000	3	16.371.300	3	18.008.430	3	18.008.430	-	-
Pengadaan Mabeleur	Jumlah Unit/Paket Pengadaan Mabeleur sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran	1	2	6.970.000	2	8.600.000	10	44.000.000	12	48.400.000	15	53.240.000	17	58.564.000	17	58.564.000	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	1	35.228.000	1	35.228.000	1	38.750.800	1	42.625.880	1	46.888.468	1	51.577.315	1	51.577.315	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Paket Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1	1	54.300.000	1	63.500.000	1	69.850.000	1	76.835.000	1	84.518.500	1	92.970.350	1	92.970.350	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3	3	10.850.000	0	-	3	11.935.000	3	13.128.500	3	14.441.350	3	15.885.485	3	15.885.485	-	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur.	Jumlah Paket Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.	0	0	-	0	-	3	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.965.000	2	19.965.000	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.	Jumlah Paket Rehabilitasi Gedung Kantor	0	0	-	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	1	300.000.000	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95	95	537.843.500	95	510.368.700	95	561.405.570	95	617.546.127	95	679.300.740	95	747.230.814	95	747.230.814	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Tagihan Listrik,Telepon/Internet,d an Air	36	36	26.545.100	36	26.545.100	36	29.199.610	36	32.119.571	36	35.331.528	36	38.864.681	36	38.864.681	-	-
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi/Teknis Lainnya/ Tenaga Kontrak	21	24	141.126.400	24	101.001.600	24	111.101.760	24	122.211.936	24	134.433.130	24	147.876.443	24	147.876.443	-	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	5.498.000	1	5.498.000	1	6.047.800	1	6.652.580	1	7.317.838	1	8.049.622	1	8.049.622	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	2.605.000	1	2.605.000	1	2.865.500	1	3.152.050	1	3.467.255	1	3.813.981	1	3.813.981	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Paeraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Paeraturan Perundang-undangan	2	2	27.500.000	2	27.500.000	2	30.250.000	2	33.275.000	2	36.602.500	2	40.262.750	2	40.262.750	-	-
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah	2	2	240.000.000	2	256.650.000	2	282.315.000	2	310.546.500	2	341.601.150	2	375.761.265	2	375.761.265	-	-
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyedia Alat Tulis kantor, Cetakan, Penggandaan serta makanan dan Minuman sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran	4	4	94.569.000	4	90.569.000	4	99.625.900	4	109.588.490	4	120.547.339	4	132.602.073	4	132.602.073	-	-



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Perdagangan Kabupaten Bone memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Bone melalui peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja maupun dalam upaya memberikan kesejahteraan terhadap pedagang dan pengrajin serta masyarakat luas.

Olehnya itu diperlukan pengimplementasian kebijakan pembangunan Perdagangan melalui penyalarsan dan mengsinergikan langkah perencanaan dan pelaksanaan melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku usaha dan masyarakat.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Kegiatan pembangunan Perdagangan Kabupaten Bone, maka perlu ditetapkan parameter yang merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan atas azas rasionalitas, realitas dan factual serta dapat diukur secara kuantitatif.

Indikator kinerja sebagai parameter capaian yang berdampak strategis bagi perwujudan visi, misi dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembagunan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sesuai dengan RPJMD

INDIKATOR IMPACT	BASELINE	TARGET					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11.53	11.54	11.77	12.01	12.25	12.49	12.74



BAB VIII PENUTUP

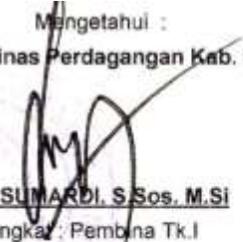
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 serta Kebijakan Kementerian Teknis.

Kontribusi pelaku usaha sektor perdagangan Kabupaten Bone dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Pengembangan usaha sektor perdagangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya diantaranya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu sinergitas antara kedua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting.

Dengan adanya berbagai dinamika, Pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan review terhadap RPJMD 2018-2023. Oleh karena itu Dinas Perdagangan Kabupaten Bone menindaklanjutinya dengan melakukan review terhadap Renstra yang ada. Dengan adanya review Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Mengetahui :
Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bone


H. SUMARDI, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 196808211991031010

